



RENJA BAPPERIDA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2026

*Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir dapat diselesaikan dengan baik.

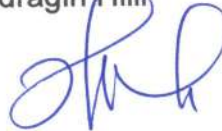
Renja Tahun 2026 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Renja Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Renja Tahun 2026 Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Renja Tahun ini dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah SWT sehingga Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Tembilahan, November 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir



H. Fihasrin, S.E., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19710318 199302 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026	II-28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran	III-4
3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bapperida s/d Tahun 2025	II-2
Tabel 2.2	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Renstra Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026	II-17
Tabel 2.3	Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024	II-20
Tabel 2.4	Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-24
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-30
Tabel 3.1	Prioritas dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026	III-1
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026	III-5
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir	III-7
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	IV-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-1
------------	---	-----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

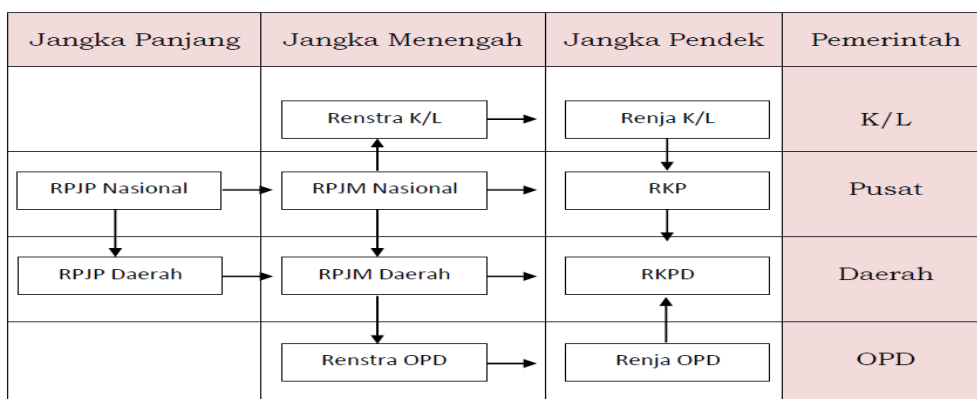
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 ini merupakan instrumen penting dan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Penyusunan Renja ini memiliki kedudukan strategis sebagai penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Bapperida periode 2025-2029 dan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Renja-PD ini disusun sebagai panduan kerja tahunan Perangkat Daerah dan telah melalui serangkaian proses penyusunan diantaranya (1) Persiapan Penyusunan, (2) Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, serta (5) Perumusan Rancangan Akhir.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan yang lebih luas, yaitu keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra-PD, dengan Renja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Renja provinsi/kabupaten/kota terkait.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh sumber daya, program, kegiatan, dan subkegiatan dapat diarahkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419)
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2044;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor 8);



- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 5);
- 16) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 Nomor 61);
- 17) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 18) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja-PD adalah menyediakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang definitif dan final, yang menjadi pedoman operasional dan alat pengendalian bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Sementara tujuan penyusunan Renja-PD ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan dan menterjemahkan sasaran dan indikator kinerja Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang lebih terperinci.
- 2) Memastikan keselarasan (koordinasi dan konsistensi) antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2026.
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja tahunan dalam rangka mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra-PD.



- 4) Menjamin ketersediaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang efektif dan efisien untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Bapperida Tahun 2026 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan



yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menyajikan identifikasi dan analisis mendalam terhadap isu-isu krusial yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk menghasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses peninjauan ulang (review) yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan bahwa usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah telah selaras dengan arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian yang dilakukan Perangkat Daerah terhadap usulan program/kegiatan yang diajukan oleh berbagai pemangku kepentingan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Uraian penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu



penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Menyajikan penjelasan naratif mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun perencanaan untuk memberikan konteks dan justifikasi terhadap rumusan program dan kegiatan yang diusulkan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta indikator kinerja dan alokasi pendanaan tahun 2026.

BAB V. PENUTUP

Menyajikan uraian penutup, berupa catatan penting, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menetapkan landasan analitis bagi perumusan rencana kerja tahun berjalan dengan menyajikan hasil evaluasi kinerja Bapperida pada tahun sebelumnya (2024) dan tahun berjalan (2025). Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi isu-isu kritis, serta merumuskan rekomendasi strategis yang mengarahkan perencanaan tahun 2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah mengaitkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk menetapkan landasan data yang kuat terhadap perumusan isu-isu penting, Bapperida menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Perkiraan Capaian Kinerja hingga Tahun Berjalan (Tahun 2025). Evaluasi ini mengukur secara terperinci tingkat keberhasilan setiap Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah, serta menghitung persentase pencapaian terhadap target Renstra. Hasil komparasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja (performance gap) yang akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Tabel berikut menampilkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) :



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100		100	100	100	100	66,67	66,67
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Persen	100		100	90	90	100	63,33	63,33
5.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15		5	4	80	5	9	60,00
5.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	9		3	3	100	3	6	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Kinerja SKPD									
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100		100	60,17	60,17	100	53,39	53,39
5.01.01.2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	149		43	41	95,35	41	82	55,03
5.01.01.2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100		100	36,36	36,36	100	45,45	45,45
5.01.01.2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	51		10	4	40	18	22	43,14



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Persen	100		100	50,10	50,10	100	50,03	50,03
5.01.01.2.06.0 001	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		2	2	100	2	4	66,67
5.01.01.2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	18		5	5	100	6	11	61,11
5.01.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12		4	4	100	4	8	66,67
5.01.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9		3	3	100	3	6	66,67
5.01.01.2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	90		30	19	63,33	30	49	54,44
5.01.01.2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	285		95	100	100	12	112	39,30
5.01.01.2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	24		3	3	100	3	6	25,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	pada SKPD	Berbasis Elektronik pada SKPD									
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang disediakan	Persen	6		2	0	0	2	2	33,33
5.01.01.2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	18		7	0	0	2	2	11,11
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Persen	100		100	39,94	39,94	100	46,65	46,65
5.01.01.2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
5.01.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36		12	12	100	12	24	66,67
5.01.01.2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15		5	5	100	12	17	113,33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Persen	100		100	60,20	60,20	100	53,40	53,40
5.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	123		41	43	104,88	43	86	69,92
5.01.01.2.09.007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3		1	0	0	1	1	33,33
5.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	159		53	54	101,89	53	107	67,30
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPD kedalam RKPD Kab.Inhil	%	100		100	50	50	100	50,00	50,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/	Dokumen	2		2	2	100	2	4	200,00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
		Perkada									
5.01.02.2.01.0 001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5		2	1	50	1	2	40,00
5.01.02.2.01.0 003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	3		1	1	100	2	3	100,00
5.01.02.2.01.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	54		54	0	0	0	0	0,00
5.01.02.2.01.0 005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	4		2	2	100	2	4	100,00
5.01.02.2.01.0 007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	Dokumen	8		3	2	66,67	3	5	62,50
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan	Persen	100		100	100	100	100	66,67	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Pembangunan Daerah	Pembangunan SKPD sesuai Standar									
5.01.02.2.02.002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	9		54	3	5,56	54	57	633,33
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Persen	100		100	100	100	100	66,67	66,67
5.01.02.2.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6		3	2	66,67	2	4	66,67
5.01.02.2.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	3		5	1	20	1	2	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah (RPJPD,RPD,RENST RA RKPD dan RENJA)	%	100		100	100	100	100	66,67	66,67
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	Persen	100		100	50,78	50,78	100	50,26	50,26
5.01.03.2.01.0 001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9		3	2	66,67	3	5	55,56
5.01.03.2.01.0 003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5.01.03.2.01.0 004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.01.0 005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	9		3	2	66,67	3	5	55,56
5.01.03.2.01.0 007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	114		38	24	63,16	38	62	54,39
5.01.03.2.01.0 008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Manusia										
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100		100	100	100	100	66,67	66,67
5.01.03.2.02.0 001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3		1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.02.0 005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3		1	1	100	1	2	66,67
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100		100	100	100	100	66,67	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5.01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	96		32	59	100	7	66	68,75
5.01.03.2.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	93		31	59	100	5	64	68,82
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	88		100	75	75	100	58,33	66,29
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Data dan Kelitbangan yang Peraturan yang dikelola	Persen	100		100	50	50	100	50,00	50,00
5.05.02.2.01.001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Laporan	3		1	0	0	1	1	33,33



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	Otonomi Daerah	Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah									
5.05.02.2.01.0 012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	3		2	1	50	1	2	66,67
5.05.02.2.01.0 013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan yang Peraturan yang Diterbitkan	Rekomen dasi	3		1	1	100	1	2	66,67
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100		100	100	100	100	66,67	66,67
5.05.02.2.04.0 001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3		1	1	100	1	2	66,67



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (s/d Tahun 2025)	
			Satuan	Target		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=7/6*100	9	10=(7+9)	11=(10/4)
5.05.02.2.04.0 003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	3		1	1	100	1	2	66,67
5.05.02.2.04.0 004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	9		3	3	100	3	6	66,67



Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut, terdapat 4 Program 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024, pada 4 program tersebut pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Cakupan Penunjang Urusan yang Terpenuhi dengan target 100% dan tingkat capaian renstranya mencapai target renstra yaitu 100%, kemudian pada Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target di tahun 2024 yaitu 100% namun capaian renstra nya masih 50%, kemudian Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target tahun 2024, 100% dengan capaian yaitu 100% dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan target 100 % namun capaian Renstranya yaitu 75%,

Namun ada beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang juga tidak mencapai target pada tahun 2024 dimana kegagalan realisasi program, kegiatan, atau sub kegiatan dalam memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan secara umum disebabkan oleh tiga kelompok faktor yang saling terkait. Pertama, faktor perencanaan yang lemah, ditandai oleh penetapan target yang terlalu ambisius dan tidak realistis sejak awal, didasarkan pada data dan asumsi yang tidak akurat, serta desain program yang memiliki logika kausalitas yang rapuh antara aktivitas yang dilakukan dengan hasil akhir yang diinginkan. Kedua, masalah implementasi dan sumber daya, di mana realisasi di lapangan terhambat oleh proses pengadaan yang molor, koordinasi antar unit pelaksana yang buruk (ego sektoral), serta ketidakstabilan dan ketidakcukupan sumber daya, baik dari segi alokasi anggaran yang dipotong mendadak maupun rendahnya kompetensi SDM pelaksana. Ketiga, gangguan eksternal, yaitu faktor di luar kendali manajemen program seperti perubahan regulasi pemerintah pusat, gejolak ekonomi (inflasi), atau hambatan sosial-politik yang tidak terprediksi, sehingga memaksa penyesuaian besar yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan kuantitas hasil/keluaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab realisasi program yang tidak mencapai target, kebijakan perencanaan dan penganggaran harus difokuskan pada penguatan kualitas dan realisme dokumen perencanaan. Tindakan perencanaan yang esensial adalah menetapkan target kinerja yang lebih realistis



dan terukur (SMART), didukung oleh analisis data yang valid dan komprehensif di tahap awal penyusunan Renja dan Renstra, serta memastikan adanya keselarasan yang kuat antara rencana program dengan alokasi anggaran (money follows program). Sementara itu, kebijakan penganggaran perlu diarahkan pada prioritas anggaran yang ketat hanya pada program yang benar-benar berdampak, alokasi anggaran yang memadai dan stabil untuk mendukung aktivitas kunci agar tidak terjadi pemotongan mendadak, serta penyediaan anggaran untuk pengembangan kapasitas SDM pelaksana program. Selain itu, perlu diwajibkan adanya rencana mitigasi risiko yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan, mencakup antisipasi terhadap hambatan eksternal seperti perubahan regulasi dan gejolak harga, sehingga proses re-alokasi dan re-focussing dapat dilakukan lebih cepat saat terjadi deviasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub-bab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja Bapperida berdasarkan perkembangan data selama periode 2020–2024. Analisis dilakukan untuk melihat dinamika kinerja dari tahun ke tahun, mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta menilai sejauh mana kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis kinerja ini dilakukan terhadap pencapaian kinerja dari sisi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan sebagai berikut

A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bagian ini disajikan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam periode 2020–2024. Analisis mencakup perkembangan indikator urusan, pencapaian target tahunan, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh Bapperida. Selain itu, bagian ini juga menyoroti faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi fluktuasi kinerja selama lima tahun terakhir, sehingga



memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bapperida
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

No	Uraian	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi
		2024	2025	2026	2024	2025*	2026
1	2	3			4	5	6
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	98.57	100	100
2	Persentase memanfaatkan Inovasi Daerah	86	87	88	90	87	88
3	Nilai AKIP Bapperida	75.00	78	80,12	73.20	78	80,12

Pada tabel berikut dapat di deskripsikan bahwa Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 terdapat penurunan dan peningkatan realisasi capaian di tahun 2024, dan proyeksi di tahun 2025 dan 2026, secara detail dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Perencanaan pembangunan daerah adalah fondasi utama dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah, yang bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam siklus perencanaan ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai kompas strategis yang memberikan arah pembangunan selama lima tahun. Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah peta jalan operasional tahunan yang memandu setiap langkah perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.

Tantangan terbesar dalam siklus ini adalah menjaga benang merah antara kompas strategis (RPJMD) dan peta jalan tahunan (RKPD). Tanpa konsistensi yang terukur, pelaksanaan pembangunan berisiko mengalami disorientasi, di mana program dan kegiatan tahunan tidak sepenuhnya mendukung sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berujung pada inefisiensi alokasi sumber daya dan lambatnya pencapaian target pembangunan.



Untuk menjawab tantangan tersebut dan memastikan setiap sumber daya dialokasikan secara efektif dan efisien, Bapperida menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU): "Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD."

Melalui pengukuran IKU ini, Bapperida berkomitmen untuk mengawal integritas dokumen perencanaan, memastikan bahwa setiap anggaran dan energi yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar berkontribusi secara utuh dan berkelanjutan pada pencapaian visi pembangunan daerah, capaian Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD tahun 2024-2026

Pada Tabel 2.2 di tahun 2024 dengan target 100% hanya dapat mencapai realisasi sebesar 98.57%,Capaian ini terjadi sedikit Penurunan konsistensi antara rencana jangka panjang (RPJMD) dan rencana tahunan (RKPD) terjadi karena rencana ideal terbentur oleh realitas lapangan setiap tahunnya. Pada dasarnya, RKPD yang seharusnya menjadi penerjemah setiap RPJMD seringkali berubah arah akibat tiga faktor utama. Pertama, tekanan politik jangka pendek dan kepentingan sektoral yang memasukkan program-program baru di luar rencana. Kedua, adanya situasi darurat seperti bencana alam atau perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang memaksa anggaran dialihkan. Ketiga, masalah teknis seperti keterbatasan anggaran yang tidak sesuai harapan dan kualitas perencanaan yang lemah, membuat program awal sulit dipertahankan. Berdasarkan realisasi tersebut Kemudian di tahun berikutnya diproyeksikan Persentase Konsistensi Program dalam RPJMD yang Dijabarkan ke dalam RKPD dapat menjadi 100% ditahun 2025 dan 2026.

2. kemanfaatkan Inovasi Daerah

Kemanfaatan Inovasi Daerah bukanlah sekadar angka dalam laporan, melainkan sebuah cerminan tentang sejauh mana sebuah terobosan pemerintah benar-benar berfungsi dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Angka ini menunjukkan perbedaan antara inovasi yang hanya sebatas diciptakan dengan inovasi yang sukses diadopsi dan memberikan solusi nyata.

persentase kemanfaatan adalah alat ukur vital untuk memastikan bahwa setiap inovasi tidak berhenti sebagai konsep atau aplikasi di atas kertas. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah daerah menciptakan terobosan



yang benar-benar "terasa" manfaatnya, mempermudah kehidupan warga, dan memajukan daerah secara.

Persentase kemanfaatan Inovasi Daerah menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2024, persentase pemanfaatan Inovasi Daerah meningkat sebesar 90% melebihi target 86% di tahun 2024. Peningkatan ini menjadi tolak ukur baru untuk bapperida karena di tahun 2025 dan 2026 berdasarkan target renstra bappeda hanya menetapkan target 87 dan 88, yakni di bawah dari realisasi di tahun 2024 namun Secara keseluruhan, data ini merefleksikan adanya komitmen berkelanjutan dan upaya untuk terus melakukan perbaikan substansial dari pemerintah daerah dalam memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat nyata dan digunakan secara optimal.

3. Nilai AKIP Bapperida

Nilai AKIP adalah Nilai Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai AKIP Bapperida menunjukkan adanya tren fluktuatif ditahun sebelumnya, di tahun 2024 Nilai AKIP Bapperida hanya mencapai 73,20 dengan target 75,00, Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Bapperida yang dapat dilihat di grafik berikut :

Nilai AKIP Bapperida menunjukkan Penurunan di tahun 2024, namun di tahun 2025 dan 2026 memiliki proyeksi yang meningkat dari sebelumnya yang didorong oleh komitmen kuat dari pimpinan untuk menerapkan AKIP, yang diiringi dengan perbaikan kualitas dokumentasi dan perencanaan kinerja agar lebih terukur dan akuntabel. Peningkatan ini juga disokong oleh peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan intensif serta tindak lanjut efektif atas rekomendasi dari evaluasi tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan sementara yang terjadi dari tahun 2021 ke 2022 kemungkinan disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti adanya perubahan standar atau metodologi evaluasi dari instansi pembina yang membuat penilaian lebih ketat, transisi organisasi (seperti mutasi pegawai kunci) yang mengganggu alur kerja, atau adanya pengalihan fokus/sumber daya untuk penanganan isu-isu mendesak lain, yang secara kolektif memengaruhi kelengkapan dan kualitas bukti-bukti kinerja yang disajikan

B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)



Bagian ini menjelaskan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode 2020–2024 sebagai ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah. Analisis fokus pada pencapaian target, tren perkembangan kinerja, konsistensi output dan outcome yang dihasilkan, serta kontribusi IKK terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Evaluasi ini memberikan gambaran sejauh mana kinerja perangkat daerah mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.3
Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra PD 2024	Realisasi Capaian 2024
1	2	3	4
1	Keselarasn Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah dan Tahunan	100	100
2	Capaian kerjasama pembangunan daerah	100	100
3	Persentase Indikator Program Daerah yang terukur	100	80
4	Persentase peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah	100	100
5	Persentase Realisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Produk Unggulan Daerah	100	100
6	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target ≥ 76 %	100	97.00
7	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100	90
8	Persentase Produk inovasi Daerah hasil dari kelitbangan yang implementasikan	100	100
9	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	100	100
10	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	100	100

Berdasarkan Tabel IKK Bapperida Berikut dapat di simpulkan bahwa terdapat beberapa indicator di tahun 2024 dengan realisasi yang mencapai target 100% yang terus di upaya kan konsistensinya di tahun berikutnya dan ada juga yang tidak mencapai target seperti berikut :



Di tahun 2024 Realisasi capaian untuk indikator sasaran daerah dalam RPJMD, yang mengukur persentase indikator kinerja yang mencapai ambang batas $\geq 76\%$, sebesar 97% terhadap target kinerja 100% merupakan sebuah prestasi kinerja daerah yang sangat tinggi dan patut diapresiasi. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, kekurangan 3% dari target absolut 100% mengindikasikan bahwa masih ada segelintir indikator sasaran daerah yang capaiannya berada di bawah ambang batas 76% (atau tidak tercapai), yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterlambatan teknis dalam pelaksanaan proyek kunci, koordinasi lintas sektor yang belum optimal pada program kolaboratif, atau hambatan eksternal yang spesifik mempengaruhi beberapa sektor. Untuk menutup kesenjangan 3% ini dan mencapai target kinerja sempurna, fokus strategis harus diarahkan pada audit kinerja mendalam terhadap indikator yang masih lemah, diikuti dengan intervensi cepat (*quick wins*), serta penguatan standarisasi pengukuran dan tata kelola koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di periode perencanaan berikutnya.

Persentase indikator program daerah yang terukur dengan capaian realisasi 80% terhadap target 100% di tahun 2024, untuk, menggarisbawahi adanya kesenjangan signifikan sebesar 20% dalam kualitas perumusan indikator, yang berarti seperlima dari indikator program belum sepenuhnya memenuhi standar terukur. Kekurangan ini terutama disebabkan oleh kurangnya Definisi Operasional (DO) yang jelas pada banyak indikator, keterbatasan pemahaman teknis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penyusunan indikator berbasis kinerja (SMART), dan lemahnya fungsi verifikasi dan validasi (*Verval*) yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) selama proses penyusunan dokumen. Untuk mencapai target 100%, strategi perbaikan harus difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM perencanaan melalui pelatihan intensif, penerapan Pedoman DO yang baku untuk setiap indikator program, serta penguatan kontrol kualitas berlapis oleh Bappeda melalui mekanisme feedback dan integrasi sistem informasi perencanaan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang tercantum benar-benar dapat diukur dan dievaluasi.



Dan untuk persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Berkualitas Baik Di tahun 2024 Pencapaian realisasi 90% terhadap target 100% menunjukkan bahwa meskipun mayoritas Perangkat Daerah (PD) telah menghasilkan dokumen yang baik, masih terdapat kesenjangan 10% yang mengindikasikan adanya PD yang dokumen perencanaannya (Renstra atau Renja) belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Kekurangan kualitas ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis SDM perencana di PD mengenai Kerangka Logika dan indikator berbasis kinerja, ketidakakuratan data baseline yang digunakan sebagai dasar perencanaan, serta kurangnya verifikasi dan validasi (Verval) substansi yang ketat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk mencapai target 100%, strategi perbaikan harus berfokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, penetapan Pedoman Teknis Kualitas Dokumen Perencanaan yang baku dan transparan oleh Bappeda, serta penguatan mekanisme Verval berlapis untuk memastikan setiap dokumen yang disahkan memiliki keterkaitan logis dan didukung oleh data yang valid.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sub-bab ini memaparkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai dasar penyusunan rancangan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Permasalahan dan Isu strategis diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 2024-2026, analisis hambatan operasional, serta keterkaitannya dengan target pembangunan daerah dan nasional.

2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Bapperid pada periode 2020–2024 menunjukkan konsistensi pada semua indikator seperti Penjabaran konsistensi program RPJMD dengan RKPD, Indeks Inovasi Daerah dan Persentase kemanfaatan inovasi daerah. Namun, terdapat sejumlah aspek kritis yang memerlukan perhatian intensif untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan layanan. Hal kritis tersebut mencakup:



- 1) Kualitas Penjabaran: Memastikan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD benar-benar secara efektif menerjemahkan sasaran dan strategi RPJMD, bukan sekadar kesamaan nomenklatur.
- 2) Dampak Implementasi: Memastikan bahwa konsistensi ini menghasilkan alokasi anggaran dan pelaksanaan program yang benar-benar terintegrasi dan berdampak pada hasil pembangunan daerah, bukan hanya kesesuaian dokumen belaka.
- 3) Metodologi Pengukuran Kemanfaatan: Fokus harus diberikan pada bagaimana persentase kemanfaatan 86% tersebut diukur. Apakah kemanfaatan diukur dari seberapa banyak inovasi itu diadopsi oleh masyarakat/PD lain, atau dari seberapa signifikan dampak inovasi tersebut terhadap peningkatan efisiensi layanan publik, peningkatan ekonomi lokal, atau perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Verifikasi Dampak (Outcome): Harus ada verifikasi lapangan yang intensif untuk membuktikan bahwa inovasi-inovasi yang dinilai "Sangat Inovatif" telah memberikan nilai tambah yang substansial, bukan sekadar perubahan prosedural.

2.2.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas kinerja perangkat daerah. Berdasarkan analisis terhadap gambaran pelayanan, capaian kinerja IKU, serta kondisi sumber daya yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dan dengan mengacu pada permasalahan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sesuai tupoksi Bapperida —yaitu " Belum Optimalnya Pelaksanaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih " maka dapat dirumuskan Permasalahan pada Bapperida sebagai berikut:

- 1) Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal
- 2) Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagai Masukan dalam Perumusan Kebijakan Daerah



Untuk merangkum dan memetakan permasalahan pelayanan yang telah diuraikan secara naratif di atas, berikut disajikan Tabel Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Belum Optimal	Masih terdapat dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak sinkron dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.	Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan antar OPD belum optimal
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan kurang memadai.	Perumusan dokumen perencanaan pembangunan pada setiap urusan belum optimal.
			Terbatasnya SDM Perencana Pembangunan baik di Bappeda maupun di Perangkat Daerah.
			Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal.
2	Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagai Masukan dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Belum tersedianya kajian ilmiah yang dijadikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan daerah.	Program dan kegiatan OPD yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan tuntutan masyarakat belum melakukan kajian ilmiah.
		Persentase pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah belum optimal.	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah.

Permasalahan tersebut diatas secara langsung memengaruhi efektivitas pencapaian visi dan misi kepala daerah, terutama dalam mewujudkan Meningkatnya kualitas kebijakan publik yang responsif berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat. Dampak yang timbul antara lain:

- 1) **Kebijakan Tidak Tepat Sasaran:** Perencanaan yang buruk menghasilkan program dan kegiatan yang tidak relevan dengan prioritas dan akar masalah di masyarakat. Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang lemah berisiko menyelesaikan masalah yang salah atau hanya bersifat proyek tanpa dampak berkelanjutan.



- 2) **Alokasi Sumber Daya yang Tidak Efisien:** Alokasi anggaran, SDM, dan waktu akan terdistribusi secara tidak merata atau terbuang pada kegiatan yang tidak mendukung sasaran strategis, sehingga kebijakan publik menjadi mahal tetapi minim outcome.
- 3) **Rendahnya Akuntabilitas Publik:** Jika dokumen perencanaan tidak jelas, target kinerja sulit diukur, sehingga masyarakat dan DPRD kesulitan melakukan pengawasan. Hal ini menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
- 4) **Kebijakan Bersifat Subjektif dan Politis:** Perumusan kebijakan publik cenderung didasarkan pada asumsi, preferensi politis, atau pengalaman masa lalu tanpa didukung oleh bukti ilmiah atau data empiris dari riset yang valid. * **Kebijakan Tidak Adaptif dan Inovatif:** Daerah gagal mengadopsi solusi-solusi baru yang telah teruji melalui inovasi atau riset, sehingga kebijakan yang diterapkan bersifat tradisional, tidak efisien, dan tidak mampu menyelesaikan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
- 5) **Gagal Memprediksi dan Mitigasi Risiko:** Riset yang terabaikan tidak dapat memberikan peringatan dini atau analisis mendalam mengenai potensi risiko sosial, ekonomi, atau lingkungan dari suatu kebijakan baru.
- 6) **Kualitas Layanan Publik Stagnan:** Tanpa masukan dari hasil inovasi daerah—yang bertujuan mencari cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan—kualitas layanan publik akan cenderung stagnan dan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi.
- 7) **Ketidakresponsifan terhadap Kebutuhan Nyata:** Dokumen perencanaan yang tidak optimal cenderung kaku dan tidak mudah disesuaikan. Kebijakan yang dihasilkan menjadi lambat merespon perubahan kebutuhan mendesak di masyarakat, terutama pada sektor-sektor kritis seperti kesehatan dan pendidikan.

Meskipun berbagai permasalahan telah teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dinamika tersebut tidak berdiri sendiri. Setiap hambatan yang muncul pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara kapasitas kelembagaan saat ini dengan tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang. Dalam kerangka pencapaian



visi dan misi Kepala Daerah, kondisi ini menuntut Perangkat Daerah untuk tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang bersifat operasional, tetapi juga mampu membaca arah perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut dijabarkan tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah :

Tantangan :

- 1) Kesenjangan Kapasitas Teknis: Keterbatasan kompetensi SDM perencana di PD dalam melakukan analisis data yang mendalam, menggunakan metodologi perencanaan modern, dan merumuskan indikator kinerja yang benar-benar terukur.
- 2) Fragmentasi Data dan Informasi: Data pembangunan tersebar di berbagai PD (ego sektoral) dan tidak terintegrasi, menyulitkan penyusunan perencanaan yang berbasis bukti dan menghasilkan target yang tidak realistis.
- 3) Formalitas Proses: Proses perencanaan seringkali hanya berfokus pada pemenuhan aspek administrasi dan regulasi (misalnya, memastikan konsistensi RPJMD-RKPD) tanpa mendalami substansi dan dampak yang nyata
- 4) Kesalahan Mindset PD: PD masih cenderung menganggap riset dan inovasi sebagai kegiatan terpisah atau hanya sebagai pemenuhan syarat administratif untuk Indeks Inovasi Daerah, bukan sebagai masukan esensial dalam perumusan kebijakan.
- 5) Literasi Riset yang Rendah: Aparatur di PD memiliki keterbatasan dalam memahami, mengolah, dan menginterpretasikan hasil riset yang kompleks untuk diterjemahkan menjadi kebijakan operasional.
- 6) Diskontinuitas Kebijakan: Pergantian kepemimpinan atau perubahan prioritas yang cepat menyebabkan hasil riset yang sudah matang menjadi terabaikan dan tidak sempat diimplementasikan.
- 7) Skalabilitas Inovasi: Inovasi yang berhasil di tingkat pilot proyek sulit direplikasi atau diterapkan dalam skala besar karena keterbatasan dana, infrastruktur, atau kompleksitas regulasi.



- 8) Keterbatasan Anggaran Riset: Alokasi anggaran untuk Litbang dan kegiatan pengembangan inovasi seringkali menjadi pos yang mudah dipangkas saat terjadi rasionalisasi fiskal, menghambat keberlanjutan proses riset.

Peluang :

- 1) Digitalisasi Sistem Perencanaan: Memanfaatkan teknologi melalui implementasi sistem e-planning terpadu. Hal ini memastikan konsistensi otomatis, kecepatan pengumpulan data, dan memfasilitasi integrasi data antar-PD.
- 2) Peningkatan Kapasitas Analisis: Pelatihan intensif bagi perencana PD untuk menguasai metode data analytics dan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang menghubungkan keluaran (output) secara jelas dengan anggaran.
- 3) Pemanfaatan Riset dan Inovasi: Mengintegrasikan hasil kajian Litbang dan Indeks Inovasi Daerah ke dalam proses Musrenbang dan perumusan RKPD/Renja PD, menjadikan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
- 4) Penguatan Evaluasi Berbasis Dampak: Menggeser fokus evaluasi dari sekadar realisasi serapan anggaran menjadi evaluasi dampak (outcome) program. Hal ini memaksa PD untuk merencanakan tidak hanya aktivitas, tetapi juga hasil nyata bagi masyarakat.
- 5) Sinergi Riset Berbasis Kebutuhan: Mengintensifkan Musrenbang Riset yang melibatkan akademisi, dunia usaha, dan PD sejak tahap perumusan agenda riset, memastikan topik riset demand-driven dan relevan dengan prioritas RPJMD.
- 6) Mekanisme Knowledge Transfer Formal: Membangun unit atau platform digital khusus di Bappeda/Litbang yang berfungsi sebagai pusat informasi dan transfer pengetahuan, menerjemahkan hasil riset menjadi rekomendasi kebijakan yang ringkas dan mudah dipahami oleh PD.
- 7) Regulasi Insentif Inovasi: Mengembangkan peraturan daerah yang memberikan insentif, penghargaan, atau alokasi anggaran khusus bagi PD yang berhasil mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi berbasis riset (misalnya, Innovation Fund).



- 8) Pemanfaatan Big Data dan Data Analytics: Menggunakan teknologi untuk menganalisis data publik dalam jumlah besar sebagai pre-riset yang cepat dan murah, sehingga PD dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan inovasi secara real-time.
- 9) Kemitraan Swasta: Menggandeng sektor swasta dan startup untuk memecahkan masalah publik melalui kompetisi inovasi (misalnya hackathon), yang secara alami menghasilkan solusi yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

2.2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, serta perumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu Strategis pada Bapperida adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan
- 2) Penguatan sistem pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja pembangunan daerah yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan riset dan inovasi daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini membahas hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD, yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara usulan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan aktual. Review ini menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa perencanaan tahunan mampu menjawab isu strategis, kebutuhan pelayanan, serta target pembangunan daerah secara lebih tepat dan terukur.

Proses review dilakukan dengan membandingkan rumusan program, indikator, target, lokasi, dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan riil yang diidentifikasi melalui analisis kinerja, capaian urusan, serta dinamika isu pembangunan daerah. Dari proses ini diperoleh temuan-temuan penting yang menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, termasuk identifikasi ketidaksesuaian, kekurangan informasi, kebutuhan penyesuaian pagu, maupun kebutuhan penambahan/rasionalisasi



program dan kegiatan. Melalui review ini diharapkan Rancangan Awal RKPD dapat diselaraskan dengan kebutuhan aktual serta lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai hasil review tersebut, Bapperida menyajikan perbandingan usulan program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan pendanaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan internal Perangkat Daerah sbagaimana tabel berikut :



Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab.Inhil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				12.923.812.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				9.765.332.596	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				12.923.812.000	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.765.332.596	
5,01	PERENCANAAN				12.223.413.000	PERENCANAAN				9.115.332.596	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.814.709.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.128.087.423	
	[Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran]		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	8.814.709.000	[Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran]		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8.128.087.423	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100 Persen	49.584.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	100 Persen	3.352.000	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	32.101.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	5 Dokumen	2.002.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah					Daerah			
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	17.483.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1.350.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	6.832.469.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	6.306.882.165	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	6.766.798.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ bulan	6.301.882.165	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	65.671.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	5.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	108.232.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	114.350.000	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	108.232.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	114.350.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	1.297.436.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen	803.450.528	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.931.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.509.700	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	249.414.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	178.224.828	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	89.096.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.108.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan								
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	26.787.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.500.000	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	20.739.000	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20.000.000	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	822.773.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	487.108.000	
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	73.696.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2 Pecen	48.238.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang	-	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah Yang disediakan					disediakan			
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	48.238.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	251.759.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 Persen	598.792.730	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.147.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.011.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	103.601.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	385.792.730	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 Persen	226.991.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100 Persen	301.260.000	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	96.136.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	58.400.000	
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	14.516.000	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	53 Unit	242.860.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				408.580.000	
	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	100%	1.309.668.000	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	100%	408.580.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			RKPD					RKPD			
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Indragiri Hilir	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/ Perkada	2 Dokumen	1.095.824.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. Indragiri Hilir	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/ Perkada	2 Dokumen	310.156.000	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	391.228.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	-	-	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	31.898.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	4.600.000	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	54 Berita Acara	2.610.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	-	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	212.724.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	25.730.000	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	457.364.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	279.826.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar	100 Persen	73.082.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD sesuai Standar	-	-	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	3 Orang	73.082.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	-	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	100 Persen	140.762.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	100 Persen	98.424.000	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	2 Laporan	48.293.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan	-	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		dan Pelaksanaan Pembangunan			Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		dan Pelaksanaan Pembangunan			
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	92.469.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	98.424.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				578.665.173	
	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA]		Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah	100%	2.099.036.000	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA]		Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah	100%	578.665.173	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	100 Persen	766.075.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	100 Persen	146.720.873	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	120.159.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	46.812.000	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100.021.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	115.774.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	-	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	3 Dokumen	116.713.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	1 Dokumen	46.812.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	38 Laporan	149.367.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	8.040.000	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	164.041.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	45.056.873	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	774.267.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 Persen	219.879.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	400.173.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	71.535.700	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	374.094.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	148.343.800	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	558.694.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen	212.064.800	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	32 Laporan	357.410.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	12 Laporan	110.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pada Bidang Infrastruktur			Daerah Bidang Infrastruktur		pada Bidang Infrastruktur			
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	31 Laporan	201.284.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	12 Laporan	102.064.800	
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				650.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				700.399.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				650.000.000	
	[Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah]		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	700.399.000	[Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	650.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						daerah]					
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	320.454.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	500.000.000	
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Laporan	90.631.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	500.000.000	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	103.423.000	Pengelolaan Data dan Kelitbangan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	-	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau	1 Rekomendasi	126.400.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau	-	-	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			Pelaksanaan Peraturan		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Indragiri Hilir	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen	379.945.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. Indragiri Hilir	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 Persen	150.000.000	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	122.808.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	92.950.000	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	114.837.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	38.650.000	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi	3 Laporan	142.300.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi	3 Laporan	18.400.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Hasil-Hasil Kelitbangan			
J U M L A H					12.923.812.000					9.765.332.596	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab ini disajikan hasil penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Usulan tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun perangkat daerah lain yang menyampaikan aspirasi melalui mekanisme musrenbang atau kanal aspirasi lainnya. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan dievaluasi secara objektif, relevan dengan prioritas pembangunan daerah, serta selaras dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penelaahan dilakukan melalui kompilasi hasil musrenbang, pengumpulan masukan dari stakeholder, serta observasi lapangan. Selanjutnya, usulan tersebut dianalisis kesesuaiannya dengan isu-isu strategis dan kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah, sehingga dapat dipetakan program/kegiatan mana yang layak diakomodir, ditunda, atau diarahkan untuk ditangani oleh instansi lain yang lebih berwenang.

Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders). Secara umum, aspirasi dan usulan dari masyarakat diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengorganisasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah juga tidak terdapat usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi maupun dari pelaksanaan reses oleh Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Subbab ini menjelaskan hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional yang relevan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bapperida.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini dimaksudkan sebagai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah di tahun perencanaan telah mendukung dan selaras dengan agenda strategis nasional dan program prioritas Pemerintah Pusat. Hasil telaahan ini menjadi dasar untuk menyesuaikan fokus program Perangkat Daerah agar terjadi sinkronisasi dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagai acuan utama, Bapperida telah menelaah Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Dimana arah kebijakan RPJMN teknokratik tahun 2025 – 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi, dengan prioritas nasional tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
		Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila
		Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila



NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi Penguatan pencapaian Ketahanan Energi Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang Peningkatan ketahanan pangan Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Peningkatan Produksi Pertanian
3.	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga



NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
5.	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global
		Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas
		Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air
		Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
		Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi
		Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
		Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah
		Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
		Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
		Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan



NO	ASTACITA	ARAH KEBIJAKAN 2026
		Literasi Masyarakat
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa
		Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila

3.1.2 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Prioritas Nasional tersebut, dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bapperida yang berfokus pada Urusan Perencanaan, maka Bapperida memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung dan mengakselerasi pencapaian Prioritas Nasional yang relevan sebagai berikut :

“Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
- b. Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas
- c. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa
- d. Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)
- e. Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat
- f. Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa
- g. Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai oleh Bapperida pada Tahun 2026. Perumusan ini bersifat hierarkis dan fungsional, diturunkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode 2025-2029, yang sebelumnya telah diselaraskan dengan hasil analisis isu strategis di Bab II.



Selain itu, Tujuan dan Sasaran tahunan ini telah disinkronkan dan diperkuat oleh Tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026. Keterkaitan ini menjamin bahwa semua upaya Bapperida akan terarah pada pencapaian sasaran makro daerah yang disepakati, termasuk mengatasi isu-isu strategis lokal dan mendukung Prioritas Nasional yang relevan

Berikut disajikan matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2026, yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja .

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja Awal Tahun Perencanaan (2024)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renja Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif, Inovatif, dan Berkelanjutan	Rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dalam RPJMD (%)	Persen	100	100
		Indeks Inovasi Daerah (%)	Persen	Sangat Inovatif (77.98)	Sangat Inovatif (65,5)
1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah (%)	Persen	100	100
1.2	Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kajian/ Riset/Survei dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil Kajian/ Riset/Survei yang dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan/Program Daerah pada tahun berkenaan (%)	Persen	-	50
1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasil	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Nilai)	Nilai	BB (73.20)	BB (74.00)



3.3 Program dan Kegiatan

Subbab ini menyajikan penjelasan naratif mengenai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapperida pada Tahun Anggaran 2026. Perumusan ini merupakan tindak lanjut operasional yang wajib menjamin tercapainya Sasaran Perangkat Daerah dan memanfaatkan alokasi sumber daya secara efektif.

Dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, Bapperida mempertimbangkan faktor-faktor strategis berikut:

- 1) Program yang dipilih wajib mendukung pencapaian Prioritas Nasional, visi dan misi kepala daerah serta sasaran yang tertuang dalam RKPD.
- 2) Program diarahkan untuk mendayagunakan potensi ekonomi daerah dan mengatasi ketertinggalan
- 3) Program difokuskan pada upaya mengatasi Isu-isu Penting yang timbul dari evaluasi kinerja tahun lalu

Pada Tahun Anggaran 2026, Bapperida merencanakan pelaksanaan 4 Program yang terurai menjadi 13 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang tersebar di beberapa Kawasan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan untuk seluruh rencana kerja adalah sebesar Rp. 9.765.332.596. Kebutuhan ini dirinci lebih lanjut menurut sumber pendanaannya (Dana Alokasi Umum (DAU))

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bapperida Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				9.765.332.596				12.445.376.641
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9.765.332.596				12.445.376.641
5,01	PERENCANAAN				9.115.332.596				12.238.397.838
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.128.087.423				9.307.848.193
	[Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	8.128.087.423			-	9.307.848.193
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	3.352.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	44.679.000
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	5 Dokumen	2.002.000			-	26.980.000
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	3 Laporan	1.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	17.699.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	6.306.882.165	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.287.500.095
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	49 Orang/bulan	6.301.882.165	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	7.215.270.095
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Indragiri Hilir	1 Laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	72.230.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	114.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Indragiri Hilir	14 Orang	114.350.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	803.450.528	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	1.474.990.098
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	2 Paket	7.509.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	16.967.400
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	8 Paket	178.224.828	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	350.626.500
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	4 Paket	94.108.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	93.404.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	3 Paket	16.500.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	28.646.300
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	20 Dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	31.739.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	12 Laporan	487.108.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	953.606.898
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	598.792.730	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	267.465.000
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	4 Laporan	3.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	6.400.000
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	12 Laporan	210.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	150.273.000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Indragiri Hilir	12 Laporan	385.792.730	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	110.792.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	301.260.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	233.214.000
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Indragiri Hilir	47 Unit	58.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	102.800.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	-	-	Kab. Indragiri Hilir	-	8.128.087.423	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	9.307.848.193
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Indragiri Hilir	53 Unit	242.860.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	130.414.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				408.580.000			-	859.885.830
	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100%	408.580.000			-	859.885.830
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/ Perkada	Kab. Indragiri Hilir	2 Dokumen	310.156.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	762.512.800
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kab. Indragiri Hilir	1 Berita Acara	4.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	35.112.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Indragiri Hilir	1 Berita Acara	25.730.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	228.289.800
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	2 Dokumen	279.826.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	499.111.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	98.424.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	97.373.030
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	5 Laporan	98.424.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	97.373.030
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				578.665.173			-	2.070.663.815
	[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA]	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah		100%	578.665.173			-	2.070.663.815
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	146.720.873	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	591.797.000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	1 Dokumen	46.812.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	130.570.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	1 Dokumen	46.812.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	124.882.000
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	12 Laporan	8.040.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	160.822.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Indragiri Hilir	1 Laporan	45.056.873	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	175.523.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	219.879.500	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	828.465.690
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	2 Dokumen	71.535.700	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	428.185.110
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Indragiri Hilir	1 Dokumen	148.343.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	400.280.580



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		RPJMD dan RKPD)							
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	212.064.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	650.401.125
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kab. Indragiri Hilir	12 Laporan	110.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	382.428.700
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kab. Indragiri Hilir	12 Laporan	102.064.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	267.972.425
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				650.000.000			-	206.978.803
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				650.000.000			-	206.978.803



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	[Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatkan kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah]	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan		100%	650.000.000			-	206.978.803
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kab. Indragiri Hilir	1 Dokumen	500.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	0,00
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Kab. Indragiri Hilir	100 Persen	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	206.978.803
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Indragiri Hilir	1 Dokumen	92.950.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	132.000.000
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kab. Indragiri Hilir	1 Laporan	38.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	53.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kab. Indragiri Hilir	3 Laporan	18.400.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		-	21.978.803
J U M L A H					9.765.332.596				12.445.376.641



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						9.765.332.596,00							12.445.376.641,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.765.332.596,00							12.445.376.641,00	
	5.01	PERENCANAAN						9.115.332.596,00							12.238.397.838,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.128.087.423,00						-	9.307.848.193,00	
		[Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran]	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	8.128.087.423,00	-	-	-	-	-	-	9.307.848.193,00	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai Standar	-			100 Persen	3.352.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	44.679.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2.002.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		26.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	1.350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		17.699.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-			100 Persen	6.306.882.165,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	7.287.500.095,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	6.301.882.165,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7.215.270.095,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUT COME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		72.230.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-			100 Persen	114.350.000,00			-	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	114.350.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	-			100 Persen	803.450.528,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1.474.990.098,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	7.509.700,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		16.967.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	178.224.828,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		350.626.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	94.108.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		93.404.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	16.500.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		28.646.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		31.739.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	487.108.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		953.606.898,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	-			100 Persen	598.792.730,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	267.465.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		6.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		150.273.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	385.792.730,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		110.792.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	-			100 Persen	301.260.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	233.214.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	58.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		102.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		-	-	-	-	-	-	8.128.087.423,00	-	-	-	-	-	-	9.307.848.193,00	-
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				53 Unit	242.860.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		130.414.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						408.580.000,00						-	859.885.830,00	
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	408.580.000,00	-	-	-	-	-	-	859.885.830,00	-
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	-			2 Dokumen	310.156.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Perangkat Daerah	-	762.512.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	4.600.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Perangkat Daerah		35.112.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	25.730.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Perangkat Daerah		228.289.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	279.826.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Perangkat Daerah		499.111.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Capaian Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Kategori Tinggi - Sangat Tinggi (Interval 75 % - 100 %)	-			100 Persen	98.424.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir	-	97.373.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	98.424.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		97.373.030,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						578.665.173,00						-	2.070.663.815,00	
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA]	Cakupan Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat daerah	100	100	100	100	578.665.173,00	-	-	-	-	-	-	2.070.663.815,00	-
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan Pelaksana Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan manusia	-			100 Persen	146.720.873,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir	-	591.797.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	46.812.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		130.570.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	46.812.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		124.882.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	8.040.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		160.822.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	45.056.873,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	38 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		175.523.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Cakupan Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	-			100 Persen	219.879.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	10 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir	-	828.465.690,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	71.535.700,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	10 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		428.185.110,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	148.343.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	10 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		400.280.580,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan Pelaksanaan koordinas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	-			100 Persen	212.064.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	6 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir	-	650.401.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	6 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		382.428.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				12 Laporan	102.064.800,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	6 Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		267.972.425,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						650.000.000,00							206.978.803,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						650.000.000,00						-	206.978.803,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah]	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	650.000.000,00	-	-	-	-	-	-	206.978.803,00	-
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Jumlah Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	-			100 Persen	500.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>				1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Reformasi manajemen pemerintahan melalui percepatan implementasi akuntabilitas kinerja	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</i>	-			100 Persen	150.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir	-	206.978.803,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	92.950.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	38.650.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan															
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	18.400.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TRANSFORMASI TATA KELOLA Peningkatan kualitas Sumber daya manusia dasar	Seluruh Perangkat Daerah Kab. Indragiri Hilir		21.978.803,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	J U M L A H							9.765.332.596,00							12.445.376.641,00		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) Bapperida Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan puncak dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen ini telah mengakomodir hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis, serta menyelaraskan program pembangunan dengan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah RKPD Indragiri Hilir Tahun 2026.

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta target dan kebutuhan pendanaan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan instrumen pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.1 Catatan Penting

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius selama proses pelaksanaan Renja ini:

- a) Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan wajib difokuskan pada pencapaian Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan pada Bab III. Program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pengentasan Isu-isu Penting (Bab II) harus diutamakan dalam realisasi anggaran.
- b) Apabila ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam APBD tidak sesuai dengan kebutuhan ideal (Pagu Indikatif) yang tercantum dalam Renja, maka pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan akan disesuaikan secara proporsional. Penyesuaian wajib memperhatikan KUA dan PPAS, dengan tetap mempertahankan program yang mendukung prioritas utama.
- c) Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub harus responsif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang mungkin terjadi setelah Renja ini ditetapkan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Bapperida berpedoman pada kaidah-kaidah berikut untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas:



a) Konsistensi

Pelaksanaan wajib konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, dan RKP (Pusat), serta mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Tahun 2026.

b) Transparan dan Akuntabel

Setiap alokasi anggaran dan realisasi program wajib dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Efisiensi dan Efektivitas

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian target kinerja.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Setelah penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

- a) Renja ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Bidang/Unit Kerja dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2026
- b) Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar bagi proses pengendalian, pelaporan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, baik secara triwulanan maupun tahunan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, Bapperida berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rencana kerja yang telah disepakati demi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tembilahan, November 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir



H. Fihasrin, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710318 199302 1 001

